



RLPPD 2023

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. BUPATI BINTAN
AHDI MUQSITH, S.I.P. WAKIL BUPATI

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

KINERJA MAKRO DAERAH



Tahun 2023

77,5%

Tahun 2022

76,8%



Tahun 2023

6,14%

Tahun 2022

4,44%



Tahun 2023

5,9%

Tahun 2022

6,44%



Tahun 2023

Rp.151,2 jt

Tahun 2022

Rp.140,6 jt



Tahun 2023

5,43%

Tahun 2022

6,91%



Tahun 2023

0,27

Tahun 2022

0,29%

KESEHATAN

1,51%	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
100%	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
91,17%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
88,62%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
92,08%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100%	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
98,65%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
99,23%	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
85,61%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
98,35%	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100%	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
100%	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
100%	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

TRANTIBUM & LINMAS

100%	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
100%	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
100%	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
13,75 MENIT	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG

23,29%	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota
25,15%	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota
100%	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
91,03%	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
84,50%	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
100%	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota
72,43%	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota
94,44%	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
100%	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

PERUMAHAN & PEMUKIMAN

100%	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
100%	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
1,11%	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4,74%	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
16,35%	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

PENDIDIKAN

96,51%	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
97,62%	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
94,47%	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
22,41%	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

SOSIAL

100%	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)
100%	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

KEUANGAN DAERAH

(DATA KEUANGAN ANAUDITED)

BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 Rp1.130.223.625.116,21

Rp923.296.549.974,72



BELANJA OPERASI

Rp98.394.859.215,49



BELANJA MODAL

Rp1.227.737.655,00

BELANJA TAK TERDUGA

Rp107.304.478.271,00



BELANJA TRANSFER

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH Rp1.125.932.190.819,32

URAIAN REALISASI

Pendapatan Asli Daerah	Rp279.759.209.266,32
Pendapatan Transfer	Rp842.657.689.620,00
Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah	Rp3.515.291.933,00

INOVASI DAERAH

Kabupaten Bintan memastikan daerah berkinerja dengan baik, setelah melewati pemulihan Covid-19. Kabupaten Bintan kemudian mendapatkan anugerah Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kategori daerah perbatasan terinovatif se-Indonesia.

Penghargaan prestisius lainnya diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan adanya inovasi pelayanan publik "Kampung Kerupuk" sebagai Top 45 Inovasi Nasional dari 1917 proposal yang masuk pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023 sekaligus menerima Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 diserahkan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Ini mengukuhkan kepemimpinan Bupati Bintan selama 2 tahun begitu piawai secara berturut-turut mengawinkan gelar inovasi IGA Award-Kemendagri dan Top 45 Inovasi Nasional-Kemenpan RB.

EPPD & OPINI LKPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk Kabupaten Bintan atas laporan tahun 2022 memiliki skor 3,2662 diperingkat 62 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dan untuk di Kabupaten Se Kepulauan Riau kabupaten Bintan memiliki skor tertinggi.

Berdasarkan kondisi yang tersebut, maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari BPK RI. Keberhasilan Opini WTP 12 tahun berturut-turut bagi Kabupaten Bintan Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

WTP 12X

2011-2022
LHP-LKPD

SARAN & MASUKAN:

Dapat dikirimkan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

WEB: <http://ppid.bintankab.go.id> atau <https://sahara.bintankab.go.id>

EMAIL: bintan88pemerintahan@gmail.com